

---

## Analisis Sentimen Kepala Daerah Terpilih Jelang dan Pasca Pelantikan Resmi Sebagai Pemimpin Daerah Terpilih pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020

---

Suwandi Sumartias<sup>1</sup>,  
Eny Ratnasari<sup>2</sup>

---

Universitas Padjadjaran

email :  
[eny12001@mail.unpad.ac.id](mailto:eny12001@mail.unpad.ac.id)

### Abstrak

Peran media sosial dalam komunikasi massa membentuk korelasi yang kuat terha Keikutsertaan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilkada 2020 menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Peneliti menemukan bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka akan selalu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo disebut-sebut membangun politik dinasti dengan melibatkan menantu dan putra sulungnya. Setelah kontestasi usai dan ternyata Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka menang di daerah pilihannya masing-masing, hal itu semakin menambah perbincangan dan pemberitaan mereka. Peneliti memantau opini sebelum dan sesudah pelantikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta. Dengan menggunakan metode netnografi, peneliti melakukan pemantauan dengan bantuan alat pemantau media Brand24 dari tanggal 18 Februari hingga 27 Februari 2021. Hasil penelitian menunjukkan lebih banyak berita dan opini mereka di ranah digital yang memiliki sentimen positif. Namun, peneliti juga memantau kata kunci "Politik Dinasti". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif lebih tinggi daripada sentimen positif. Opini terkait politik dinasti didominasi oleh kicauan publik terkait pemilihan Bobby dan Gibran, tak lupa mengaitkannya dengan Presiden Joko Widodo. Penelitian opini publik ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim komunikasi Bobby dan Gibran dalam melakukan political branding. Strategi komunikasi politik Bobby dan Gibran harus lebih dijaga karena setiap gerak-gerik mereka akan selalu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

---

dap media lainnya. Pesan yang terdistribusi melalui platform jejaring sosial kerap menjadi sumber yang berarti pada proses organisasi media massa dalam menciptakan dan menyebarkan pesan kepada publik. Melalui riset kualitatif dengan teknik deskriptif, artikel ini mencoba menelusuri bagaimana pesan-pesan komunikasi massa diproduksi melalui dua media yang berbeda.

---

**Kata Kunci:** Bobby Nasution, politik keluarga, gibran rakabuming raka, jokowi, penelitian opini publik, analisis sentimen

---

## A. PENDAHULUAN

Fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti di Indonesia telah berlangsung lama. Fenomena ini termasuk dalam budaya primordial di Indonesia. Budaya primordial merupakan suatu pandangan atau pemahaman yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa oleh seorang anak, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama ini. Penerapan politik dinasti tidak dilarang dan secara tidak langsung juga “diperbolehkan” dalam hukum positif Indonesia (Mukti & Rodiyah, 2020).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember menuai sejumlah kontroversi karena digelar ditengah pandemi *COVID-19* dan memperlihatkan kuatnya tren politik dinasti (nasional.tempo.co, 2020). *Nagara Institute* seperti dikutip oleh Tempo.co menyatakan bahwa sebanyak 124 calon kepala daerah terpapar dinasti politik pada Pilkada tahun ini (nasional.tempo.co, 2020). Calon kepala daerah tersebut tersebar di 29 provinsi, jumlah paling banyak berada di Jawa Tengah yaitu 15 pasangan calon, disusul dengan Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara (bbc.com, 2020). Mereka merupakan istri, anak, atau kerabat dekat dari kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat (nasional.tempo.co, 2020).

Adanya pandemi *COVID-19* membuat sejumlah pasangan calon kepala daerah menggunakan teknologi digital sebagai strategi kampanye mereka. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial memiliki kemampuan dalam kecepatan menyampaikan pesan kepada khalayak atau pengguna media sosial lainnya karena dukungan teknologi komunikasi yang mampu menjangkau khalayak lebih luas dan lebih cepat (Susanto, 2017).

Partai politik merupakan representasi masyarakat di suatu daerah. Dengan demikian, sudah seharusnya partai politik memberikan sajian demokrasi yang bersih dan bermartabat. Selain itu, tuntutan pendidikan politik harus dilaksanakan oleh partai

politik dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Praktik politik kekerabatan menjadi sah dilakukan apabila kandidat terkait dapat dipercaya dari segi kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila terdapat kandidat yang terikat kekerabatan menyalahi aturan yang ada sebaiknya diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Pamungkas, 2018).

Pasangan calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan penguasa sebelumnya mempunyai banyak keuntungan (Pamungkas, 2018). Keuntungan tersebut berupa bagaimana tingkat popularitas pasangan calon telah terdongkrak melalui pengaruh penguasa sebelumnya. Kandidat dari keluarga politik memiliki modal politik untuk terpilih diantaranya adalah koneksi politik, pengalaman dalam partai politik, pengalaman pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan dalam pelaksanaan fungsi legislatif (Norris, 2009). Oleh karena itu, kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai legasi politik (*political legacy*) yang diwariskan, seperti pendidikan dan keterampilan politik, nama keluarga yang dikenal publik, jaringan politik, sampai dengan pendanaan kampanye. Dalam konteks politik di Indonesia, maraknya politik kekerabatan juga dipengaruhi oleh kekuatan oligarki dalam politik lokal (Purwaningsih, 2015).

Persepsi publik tentang politik dinasti atau politik kekerabatan pun bermacam-macam, baik positif maupun negatif. Terlepas dengan beberapa pandangan mengenai politik kekerabatan, segala keputusan dalam demokrasi berada di tangan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya dalam Pilkada dan hasilnya Kabupaten Klaten dikuasai oleh dua keluarga secara bergantian selama hampir 20 tahun ini (Pamungkas, 2018).

Gibran Rakabuming Raka, putra pertama dari Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Ia maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo. Dalam pencalonannya, pemberitaan di media massa diwarnai dengan pro kontra pencalonannya hingga pemberitaan yang bersifat *softening news*, dibandingkan dengan program kerjanya (Riyanti, 2020).

Peneliti komunikasi politik biasanya familiar dengan media sosial yang memiliki peran signifikan dalam formal (*electoral and state-based*) politik. Penelitian sebelumnya tentang penggunaan media sosial menemukan bahwa dalam kampanye politik, tim kampanye memandang pentingnya penggunaan media sosial untuk masyarakat di akar rumput sebagai upaya publisitas. Penggunaan media sosial dimaksudkan sebagai suatu kekuatan untuk mempengaruhi khalayak dan menanggulangi *hoax* (Santoso, 2018). Disamping itu, media sosial juga dapat meningkatkan tingkat popularitas dari suatu paslon (Krisnanto & Fitriyah, 2017).

Potret praktek komunikasi politik kandidat yang berasal dari dinasti politik seperti pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang (Vera dan Nurhasan) pada awalnya terkesan percaya diri karena mendapat dukungan dari

sejumlah partai besar dan beberapa pihak. Meski pada akhirnya pasangan calon tersebut kalah. Kekalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh pesan politik yang disampaikan dinilai kurang tepat dengan kondisi riil daerah pemilihan (Firdausi & Sururi, 2019).

Saat ini, publik semakin cerdas dalam memilih dan mengedepankan realitas kualitas kepemimpinan sebelumnya (Firdausi & Sururi, 2019). Kecerdasan elite dan publik memang dibutuhkan untuk menyikapi dominasi rezim demokrasi visual yang terjadi saat ini. Elite yang cerdas akan mampu melakukan praktik komunikasi politik dengan mengedepankan substansi pesan-pesan politik yang bermakna bagi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Publik yang aktif dan cerdas akan mampu menjadi *well-informed voter*. Diperlukan dukungan bagi elite dan publik yang cerdas (Nyarwi, 2010).

*Political branding* yang ditampilkan selama masa kampanye tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial yang dimiliki oleh kontestan (Husna, 2017). Strategi *political branding* di media sosial pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil. Ia memanfaatkan media sosial *Twitter* pada masa Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Ridwan Kamil menggambarkan sosok dirinya sebagai politisi yang aktif bermedia sosial untuk membangun citra politisi yang terbuka, dekat dengan masyarakat, kredibel, dan merakyat (Abidin & Cindoswari, 2019).

Calon yang mendapat sorotan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dikarenakan kedua calon pemimpin daerah ini diisukan termasuk dalam politik dinasti Presiden Joko Widodo yang tengah menjabat saat ini. Keduanya juga berhasil memenangkan kontestasi di wilayah masing-masing. Fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat praktek politik dinasti dalam demokrasi di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra.

Peneliti menggunakan analisis sentimen untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasi opini dengan bantuan *media monitoring analysis Brand24*. *Sentiment analysis is identifying and categorizing opinions in a piece of text determining if the attitude expressed is positive, negative, or neutral* (Oxford University Press, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif opini yang ada di dunia digital terkait Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution menjelang dan pasca pelantikan resmi sebagai pemimpin daerah terpilih. Pemilihan kedua kepala daerah terpilih ini didasari oleh pertimbangan bahwa kedua orang ini adalah calon kepala daerah yang termasuk dalam dinasti politik presiden yang tengah menjabat yaitu Joko Widodo. Disamping itu, hasil pra riset peneliti menunjukkan bahwa Gibran dan Bobby mendapat perhatian lebih dari masyarakat Indonesia terbukti dengan banyaknya pemberitaan tentang politik dinasti yang mengarah pada kedua orang ini.

Dalam perbincangan media sosial pun, frase politik dinasti juga mengarah pada kedua orang ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi. Netnografi juga disebut dengan virtual etnografi dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang sesuai untuk memahami tentang perilaku sosial di ranah digital (Bengry-Howell, Wiles, Nind, & Crow, 2011; Chen, 2008; Hine, 2015; Kozinets, 2015). Netnografi juga dapat didefinisikan sebagai penelitian partisipan observasional yang berbasis di dunia digital sebagai tempat penelitian (Kozinets, 2015). Netnografer berfungsi untuk mendengarkan, membandingkan, dan memahami cerita tentang bagaimana narasi dibangun dan dibagikan (Kozinets, 2015).

Dalam metode netnografi, peneliti memanfaatkan *social media monitoring analytical tools*. Peneliti mengumpulkan data yang berbasis *time series* melalui aplikasi *brand24*. Peneliti memasukkan sejumlah kata kunci yaitu Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Data yang dihimpun oleh aplikasi *brand24* adalah *Twitter, blog, video, forum, berita, serta website*. Data yang dihimpun oleh aplikasi *brand24* adalah data yang menyebutkan (*mention*) kata kunci Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Penyebutan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala bentuk unggahan di dunia digital yang mengandung unsur, frasa, maupun kata dari *keywords* tersebut.

Data penelitian dihimpun secara *online* dari *user* yang berasal dari seluruh Indonesia. Data diambil harian mulai dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021. Rentang tanggal ini dipilih karena hasil pra penelitian menunjukkan adanya peningkatan perbincangan di ranah siber menjelang pelantikan pemimpin daerah pada 26 Februari 2021. Peneliti menemukan adanya peningkatan ketika 8 hari menjelang pelantikan yaitu pada tanggal 18 Februari 2021. Kemudian naik drastis pada tanggal 26 Februari 2021 dan 27 Februari 2021. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi dari hasil *insight* yang didapatkan melalui *analytical tools*.

## **B. Kajian Pustaka**

### **Sentimen Terhadap Bobby Nasution di Ranah Digital**

Selama periode 18 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021, Bobby Nasution mendapat penyebutan sebanyak 963, dengan total sentimen positif sebanyak 455 (81,3%) dan total sentimen negatif sebanyak 105 (18,8%). Penyebutan terbanyak terjadi pada tanggal 26 Februari 2021. Pada tanggal yang sama, Bobby mendapatkan sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif tertinggi.



**Gambar 1. Hasil Analisis *Media Monitoring Tools* Tentang Bobby Nasution dari 18 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021**

**Sumber: *Brand24***

**1**

Peneliti melakukan analisis tematik tentang topik yang paling dominan dalam media monitoring selama kurun waktu tersebut adalah pelantikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan, pidato perdana Bobby Nasution, beserta program prioritas yang akan dilakukan Bobby Nasution pasca pelantikan.

Berdasarkan hasil yang dihimpun melalui *Brand24*, pemberitaan tentang Bobby Nasution yang mendapat *reach* tertinggi adalah pemberitaan dengan sentimen netral. Berita tersebut diterbitkan oleh *sumut.suara.com* dengan judul “Pidato Perdana di DPRD Medan, Bobby: 2 Tahun Soal Infrastruktur Selesai”. Pada posisi kedua, terdapat berita yang juga memiliki sentimen netral yaitu “Jelang Dilantik Walikota Medan, Bobby Nasution Silaturahmi ke Rumah” yang ditulis oleh *jurnalmedan.pikiran-rakyat.com*. Selanjutnya, pada posisi ketiga, berita yang ditulis oleh *suara.com* dengan judul “Bobby: Harus Datang Dua Kali Ya Bu, Jika tidak, Penyuntikan akan Sia-Sia” termasuk berita dengan sentimen negatif. Selanjutnya, pemberitaan yang memiliki sentimen positif ditulis oleh *medan.tribunnews.com* dengan judul “Inilah Pidato Perdana Wali Kota Medan Bobby Nasution, Beberkan Strategi Tangani Banjir dari Hulu”.

Pemberitaan terkait pelantikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan pribadinya. Beberapa pemberitaan teratas justru menyoroti tentang kehidupan keluarga Bobby baik istri dan anaknya yang justru mendapatkan sentimen positif. Seperti yang ditulis dalam laman *merdeka.com* yang berjudul “Potret Anak Kedua Kahiyang Ayu dan Bobby Terungkap, Lucu dan Bikin Gemas”. Artikel ini pun termasuk dalam sentimen positif. Kemudian, artikel yang dimuat dalam *solo.tribunnews.com* berjudul “Gaya Kahiyang Ayu Gombalin Bobby Nasution Pakai Bahasa Jawa Curi Perhatian, Berhasil Bikin Baper” dan mendapatkan sentimen positif.

Sosok istri Bobby Nasution yakni Kahiyang Ayu juga mencuri perhatian media karena dirinya juga dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Medan. Hal ini dituliskan oleh [tribunnews.com](http://tribunnews.com) dengan judul “Tak Hanya Bobby Nasution yang Dilantik, Kahiyang Ayu Juga Punya Jabatan Baru.” Berita ini pun mendapat sentimen netral. Tidak hanya itu, penampilan Kahiyang Ayu dalam momen pelantikan juga menjadi pemberitaan dan mendapat sentimen positif. Seperti yang dituliskan dalam [liputan6.com](http://liputan6.com), “Adu Kebaya Selvi Ananda vs Kahiyang Ayu di Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution”.

Hasil analisis peneliti terkait pemberitaan yang memiliki sentimen negatif berdasarkan *media monitoring* yang dilakukan melalui *Brand24* berkaitan dengan aktivitas politik Bobby Nasution setelah resmi dilantik sebagai Walikota Medan. Seperti yang dituliskan dalam [suara.com](http://suara.com), “Bobby: Harus Datang Dua Kali Ya Bu, Jika Tidak, Penyuntikan akan Sia-Sia” dan dalam [sumut.suara.com](http://sumut.suara.com) dengan judul “Ini yang Dilakukan Bobby Nasution Usai Dilantik Jadi Wali Kota Medan.”

Pemberitaan sentimen negatif didominasi oleh pemberitaan terkait Bobby Nasution yang mendapatkan pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution mendapat fasilitas negara yakni pengawalan dari Paspampres. Topik tentang dikawalinya Bobby Nasution dengan Paspampres diberitakan dalam beberapa media seperti [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), [news.detik.com](http://news.detik.com), [viva.co.id](http://viva.co.id), [tirto.id](http://tirto.id), [nasional.okezone.com](http://nasional.okezone.com), [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), dan [medcom.id](http://medcom.id).

## Sentimen Terhadap Gibran Rakabuming Raka di Ranah Digital



**Gambar 2. Hasil Analisis *Media Monitoring Tools* Tentang Gibran Rakabuming Raka dari 18 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021**

**Sumber: *Brand24***

Selama periode 18 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021, Gibran Rakabuming Raka mendapat penyebutan sebanyak 2.577, dengan total sentimen positif sebanyak 748 (59,4%) dan total sentimen negatif sebanyak 513 (40,6%). Penyebutan terbanyak terjadi pada tanggal 26 Februari 2021. Pada tanggal yang sama, Gibran mendapatkan sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif tertinggi.

Sentimen positif berasal dari pemberitaan dan unggahan pada media sosial *Twitter* bahkan *TikTok*. Sentimen positif ini mengenai ucapan selamat karena Gibran telah resmi dilantik menjadi Walikota Solo, *blusukan* Gibran yang langsung dilakukan setelah dilantik. Selain itu, penampilan istri Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda juga menjadi perbincangan.

Sentimen negatif berasal dari pemberitaan dan unggahan pada media sosial *Twitter* tentang aktivitas politik Gibran setelah dilantik, gaya pidato Gibran, prediksi langkah politik Gibran selanjutnya, hingga mengenai hobi dan bisnis Gibran.

Pemberitaan terkait langkah politik Gibran yang memiliki sentimen negatif diterbitkan dalam laman solo.tribunnews.com dengan judul “Baru Dilantik Wali Kota, Gibran Disebut Bisa Lawan Anies di Pilgub DKI: Solo Dulu, Tidak Kemana-Mana”. Kemudian akun resmi Tempo.co yang menulis *tweet* “Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa hari Sabtu dan Minggu ini, bukan hari libur untuk dirinya dan wakilnya.” *Tweet* ini mengandung *link* berita nasional.tempo.co. Pemberitaan tentang aktivitas politik Gibran ini pun termasuk dalam sentimen negatif.

Gaya pidato Gibran pun mendapat sorotan media. Dalam laman kaltim.tribunnews.com tertulis berita dengan judul “Psikolog Sorot Gaya Pidato Gibran, Terkesan Hati-Hati, Pernyataan di Bansos Juliari Disinggung.” Adapun mengenai bisnis Gibran, finance.detik.com memberitakan bahwa dilantikannya Gibran menjadi Walikota Solo membuat Gibran harus meninggalkan bisnisnya. Bisnis tersebut kemudian diteruskan oleh adiknya, Kaesang. Bahkan oto.detik.com juga membuat berita tentang selera otomotif Gibran dalam berita yang bertajuk, “Dilantik Jadi Wali Kota, Intip Tunggungan Gibran dan Bobby.”

Adapun pemberitaan tentang Gibran Rakabuming Raka yang mendapat *reach* tertinggi memiliki sentimen negatif. Pemberitaan tersebut adalah mengenai aktivitas politiknya setelah resmi dilantik menjadi Walikota Solo. Tribunnews.com memberitakan “Sehari Setelah Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Pantau Vaksinasi hingga Ikut Polisi Razia PSK.”

Berdasarkan hasil analisis dari *Brand24*, *social media reach* yang didapatkan hanya 5.348.210 dan *non social media reach* yang didapatkan adalah 30.435.547. Meski demikian, mengetahui perbincangan di ranah *Twitter* tetap diperlukan karena salah satu *tweet* tentang Gibran yang meraih *reach* tertinggi justru memiliki sentimen negatif (Gambar 3). *Tweet* pada Gambar 3 mengkritisi aktivitas politik Gibran yang



memang sudah seharusnya seorang pemimpin terjun ke lapangan setelah resmi dilantik.



**Gambar 3. Hasil Tangkapan Layar *Tweet* dengan Sentimen Negatif yang Menyebutkan Gibran Rakabuming Raka**  
**Sumber: *Twitter***

Sama halnya dengan Bobby Nasution, bukan hanya Gibran Rakabuming Raka yang dilantik sebagai Walikota Surakarta yang diberitakan oleh media. Pembicaraan di media sosial dan pemberitaan juga mengangkat penampilan istri Gibran yaitu Selvi Ananda. Bahkan secara umum, *reach* tertinggi mengenai Gibran justru datang dari pembicaraan mengenai istri Gibran yaitu Selvi Ananda dalam aplikasi *video platform TikTok* (Gambar 4). Akun bernama Baguz Bayu mengunggah “Selamat Atas Pelantikannya. BTW Cantik banget. SETUJU Gak nih?” Dilengkapi dengan beberapa *hashtag* #gibran #fyp #fypdong #selvi #walikotasolo #fypgakni”



**Gambar 4. Hasil Tangkapan Layar Unggahan dengan *Reach* Tertinggi di *Video Platform TikTok* Tentang Selvi Ananda**  
**Sumber: *TikTok***



**Gambar 5. Hasil Tangkapan Layar Akun *TikTok* Tribunnews Tentang Selvi Ananda, Istri Gibran Rakabuming Raka 3**  
**Sumber: *TikTok***

Tribunnews melalui kanal *TikTok* membuat video berita mengenai pelantikan Selvi Ananda sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Surakarta. Tertulis keterangan yang menyertai video unggahan tersebut “Gibran Resmi Jadi Wali Kota Solo, Selvi Ananda Kini Menjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda” Unggahan ini dilengkapi dengan beberapa *hashtag* #fyp #tiktokberitaterkini #walikotasolo #gibran #selvi.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Analisis Sentimen Tentang Politik Dinasti Saat Menjelang dan Pasca Pelantikan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka**

Peneliti juga melakukan observasi opini warga net di media sosial *Twitter* menjelang dan pasca dilantiknya Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat komentar positif, netral, dan negatif. Komentar positif dapat berupa dukungan serta pujian terhadap kegiatan, program kerja, serta visi dan misi yang diajukan oleh Bobby dan Gibran. Komentar netral dapat berupa aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat. Sedangkan komentar negatif adalah keluhan dan komentar yang menyerang Bobby dan Gibran secara personal. Peneliti mencoba untuk mengklasifikasikan beberapa tipe respon dari warga *net* terkait politik dinasti yang berkaitan dalam Tabel 1 berikut.

##### **Tabel 1. Respon Warga *Net* Terkait Politik Dinasti Saat Menjelang dan**

**Pasca Pelantikan Resmi Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka**

Klasifikasi	Contoh Tweet
Negatif	<p>Dulu tolak politik dinasti, sekarang dukung politik dinasti. Dulu anggotanya paling sering gunakan UU ITE buat laporkan pengkritik pemerintah, skr ngaku dukung revisi UU ITE. Ganti nama aja deh jadi Partai S*mpah Indonesia 🤪  <a href="https://t.co/7nSDn1KRi8">https://t.co/7nSDn1KRi8</a></p> <p>@MeanModusMedian @TirtoID demokrasi tapi politik dinasti. Kalau mau yg bersih, mereka harusnya mencalonkan diri setelah masa jabatan jokowi habis. Masalah etik</p> <p>Mental feodal melahirkan politik dinasti. Mereka melihat keadaan tak adil ini sebagai sesuatu yang alami. Mereka kemudian kawin dengan orang-orang kaya, lahir oligarki. Perkawinan busuk antara Pengusaha dan Politik ini lah yang disebut NEOLIBERALISME! (((vangke))) <a href="https://t.co/iXCnBixfb4">https://t.co/iXCnBixfb4</a></p> <p>@AnnisaPohan Tp kader PDIP dan anteknya merasa klo mrka akan hidup slmanya makanya yg mrka kejar hnya harta Dan jabatan,,korupsi besaran politik dinasti Dsb</p> <p>Apalagi convicts masih bisa nyalon &amp; kepilih lagi asal bikin pengumuman di publik. Usaha yg dibangun jg tetep jalan. Pendapatan tetep ada. Kalo konteks Indonesia, bakal lebih holistik kalo lihatnya per-HH? Karena ada budaya politik dinasti. Tapi hukum berlaku ke individu wqwq</p> <p>@sinagajls @n_d3w4 @hri_hari @hirakousukehara @asumsico Kalau sudah ga jabat mah ga berpengaruh, disini yang ditegasin itu politik dinasti yang artinya ayah atau saudaranya masih menjabat kekuasaan nah kerabatnya dicalonin utk jadi kepala daerah, disini letak tidak etisnya.</p> <p>@schfess Tanpa kerajaan politik dinasti udah banyak gimana kalau kerajaan ya pasti pemerintahan isinya keluarga raja semua hsksk kalau mau kritik bakal susah kayanya</p> <p>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Politik Dinasti , Anak Mantu Presiden Bisa Jadi Pejabat Negara Kenapa para pemimpin kita larut dalam konflik gelombang radikalisme UU ITE segera di revisi karena dianggap dalang dari memburuknya nilai indeks demokrasi. <a href="https://t.co/4rujhvhxhR">https://t.co/4rujhvhxhR</a></p> <p>Politik dinasti. Presiden lain kagak ada yg begini. Pak Harto aja perlu 32 th baru Tutut jd menteri. Lha ini baru 6 th, anak mantunya</p>

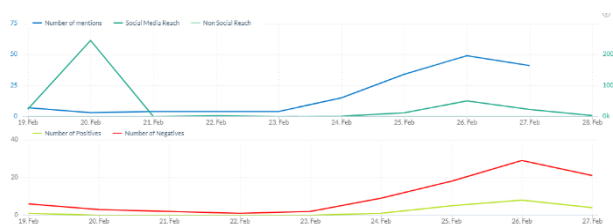
Klasifikasi	Contoh Tweet
	<p>sdh jd walkot! Gileeee!  <a href="https://twitter.com/TirtoID/status/1365495620430045186">https://twitter.com/TirtoID/status/1365495620430045186</a></p> <p>Selamat bertugas! Cukup kalian aja yg ngejalanin politik dinasti, kaesang jangan 😊</p>
Sarkas	<p>@littlesonmama @mazzini_gsp @jokowi Kalo anak Putin, jelas politik dinasti, kalo anak dan mantu pak Jokowi itu namanya demokrasi.</p> <p>Terharu banget Bapak presiden, Anak dan mantu nya dilantik jdi walikota dihari yg sama Duuh, hebat banget bisa temurun skill nya. Ah ini bukan politik dinasti kan <a href="https://t.co/ESUPrLeqD1">https://t.co/ESUPrLeqD1</a></p> <p>@TirtoID Sejarah baru ini, tentu saja, membanggakan. Bagi sebagian kalangan. Bagi sebagian yang lain, mungkin malah memalukan. Sebenarnya, ini adalah hal yang biasa saja bagi yang mempraktikkan serta meyakini kebenaran dan perlunya politik dinasti.</p>
Netral Cenderung Negatif	<p>Kemunculan Putra-Putri Politikus di Soloraya, dan Kuatnya Politik Dinasti <a href="https://www.democrazy.id/2021/02/Kemunculan-Putra-Putri-Politikus-di-Soloraya-dan-Kuatnya-Politik-Dinasti.html">https://www.democrazy.id/2021/02/Kemunculan-Putra-Putri-Politikus-di-Soloraya-dan-Kuatnya-Politik-Dinasti.html</a></p> <p>Sah... ini juga bukan politik dinasti ini hanya spontanitas aja... <a href="https://news.detik.com/berita/d-5472620/bobby-nasution-resmi-dilantik-jadi-wali-kota-medan">https://news.detik.com/berita/d-5472620/bobby-nasution-resmi-dilantik-jadi-wali-kota-medan</a> Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, resmi dilantik menjadi Wali Kota Medan. Sang istri, Kahiyang Ayu, turut hadir saat pelantikan.</p> <p>Resmi jadi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka melengkapi hatrnick tradisi politik dinasti di Indonesia. #KAMUHARUSTAU #Gibran #walikotasolo #politikdinasti <a href="https://www.indozone.id/news/Z8seNg9/jadi-wali-kota-solo-gibran-lengkapi-hatrnick-tradisi-politik-dinasti-di-indonesia">https://www.indozone.id/news/Z8seNg9/jadi-wali-kota-solo-gibran-lengkapi-hatrnick-tradisi-politik-dinasti-di-indonesia</a></p> <p>Kabarnya, sejumlah kader senior suatu partai yang sudah tidak terpakai, tiba2 banyak berkelakuan seperti gelandangan politik dan teriak2 Politik Dinasti sampai lupa regenerasi. Ada juga yang seperti kutu loncat. Kelakukan seperti itu jangan dicontoh. Mereka bukan negarawan.</p> <p>POLITIK DINASTI KEKINIAN adalah mereka yg Kemarin bilang tidak tertarik Politik lalu esoknya jadi kepala daerah.</p>
Netral	<p>Politik Dinasti adlh keniscayaan yg ada dimana2 bahkan di AS sekalipun. Aplg di negeri ini yg dulu sebelum gabung jadi NKRI</p>

Klasifikasi	Contoh Tweet
	berasal dari Kerajaan & Kesultanan. Masalahnya ada pd kualitas kepemimpinan. Kalo mmg terbukti secara obyektis berkualitas, gakpapa. Drpd maksa pilih yg oon

Sumber: *Brand24*

Tabel 1 merupakan hasil yang didapatkan melalui *media monitoring tools Brand24* terkait politik dinasti saat menjelang dan pasca pelantikan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka menjadi kepala daerah pada daerah masing-masing. Peneliti mengklasifikasikan beberapa opini menjadi opini negatif, sarkasme, netral cenderung negatif, dan netral. Dengan kata lain lebih banyak opini yang bernada negatif dibandingkan yang bernada netral maupun positif.

Pada gambar 6, terlihat bahwa sentimen negatif (garis merah) lebih banyak dibandingkan dengan sentimen positif.



**Gambar 6. Jumlah Penyebutan, Social Media Reach, Non Social Reach, dan Analisis Sentimen Politik Dinasti Menjelang dan Pasca Pelantikan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka**  
**Sumber: *Brand24***

Berkaitan dengan politik dinasti, opini warga *net* dalam media sosial *Twitter* yang peneliti dapatkan mengindikasikan bahwa hampir seluruhnya memiliki opini yang tidak baik mengenai politik dinasti. Hasil analisis *Brand24* mengkalkulasikan 83% adalah sentimen negatif sedangkan sisanya 17% adalah sentimen positif.

Opini bernada negatif tersebut bukan hanya mengarah pada Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka, melainkan juga pada Presiden Joko Widodo. Secara tidak langsung, *political branding* Presiden Joko Widodo juga dipengaruhi oleh isu politik dinasti. Oleh karena itu, tim komunikasi presiden perlu untuk melakukan pemantauan terhadap percakapan warga *net* yang berkaitan dengan Bobby dan Gibran sehingga dapat menyusun strategi komunikasi politik yang tepat.

Opini bernada negatif yang menyebutkan Presiden Joko Widodo salah satunya ada dalam *tweet* dari *@HaniBunny612*

“@MeanModusMedian @TirtoID demokrasi tapi politik dinasti. Kalau mau yg bersih, mereka harusnya mencalonkan diri setelah masa jabatan jokowi habis. Masalah etik”

Dalam *tweet* tersebut, pemilik akun mempermasalahkan etika dalam berdemokrasi. Ia menyangsikan kebersihan dari berdemokrasi jika ada politik dinasti.

Senada dengan @HaniBunny612, @Tongpaoho juga mempermasalahkan etika dalam berpolitik. Menurutnya, permasalahan politik dinasti adalah masalah etis

“@sinagajls @n\_d3w4 @hri\_hari @hirakousukehara @asumsico Kalau sudah ga jabat mah ga berpengaruh, disini yang ditegasin itu politik dinasti yang artinya ayah atau saudaranya masih menjabat kekuasaan nah kerabatnya dicalonin utk jadi kepala daerah, disini letak tidak etisnya.”

Peneliti menemukan hal yang perlu menjadi perhatian adalah komentar yang bermaksud menyindir dan sarkas. Hal ini dikarenakan komentar-komentar ini dikategorikan oleh *media monitoring tools* sebagai komentar yang netral bahkan ada pula yang positif. Komentar tersebut diantaranya adalah

“@littlesonmama @mazzini\_gsp @jokowi Kalo anak Putin, jelas politik dinasti, kalo anak dan mantu pak Jokowi itu namanya demokrasi.”

“Terharu banget Bapak presiden, Anak dan mantunya dilantik jadi walikota dihari yg sama Duuh, hebat banget bisa temurun skill nya. Ah ini bukan politik dinasti kan <https://t.co/ESUPrLeqD1>”

“@TirtoID Sejarah baru ini, tentu saja, membanggakan. Bagi sebagian kalangan. Bagi sebagian yang lain, mungkin malah memalukan. Sebenarnya, ini adalah hal yang biasa saja bagi yang mempraktikkan serta meyakini kebenaran dan perlunya politik dinasti.”

Adapun untuk komentar yang memiliki sentimen netral salah satunya ada dalam *tweet* berikut.

“Politik Dinasti adlh keniscayaan yg ada dimana2 bahkan di AS sekalipun. Aplg di negeri ini yg dulu sebelum gabung jadi NKRI berasal dari Kerajaan & Kesultanan. Masalahnya ada pd kualitas kepemimpinan. Kalo mmg terbukti secara obyektis berkualitas, gakpapa. Drpd maksa pilih yg oon”

*Tweet* yang memiliki sentimen netral ini berintikan pendapat bahwa politik dinasti pasti terjadi. *Tweet* ini juga menuliskan alasannya sebelum Indonesia ada, terdapat berbagai kerajaan. *Tweet* ini juga mencoba untuk objektif dengan menuliskan “Masalahnya ada pd kualitas kepemimpinan”. Dengan kata lain, *tweet* ini ingin menegaskan bahwa dalam pemilihan pemimpin daerah hal yang menjadi pertimbangan utama adalah kualitas pemimpin. *Tweet* ini ditutup dengan kalimat yang menegaskan bahwa tidak apa-apa jika ada politik dinasti asalkan pemimpinnya berkualitas, daripada harus memilih pemimpin yang bukan dinasti tetapi tidak berkualitas.

Algoritma dalam *media monitoring tools* mengidentifikasi kata-kata dari komentar yang bermaksud menyindir tersebut sebagai sentimen netral dan positif. Padahal konteks dari kalimat tersebut adalah sarkas. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia sebagai orang Timur yang memiliki budaya komunikasi *high context*. Artinya masyarakat Indonesia mengutamakan kesantunan dalam berkomunikasi, banyak bas-basi, dan maksud yang sebenarnya ditutup dengan kata-kata yang menggunakan gaya bahasa tertentu.

## E. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 18 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021, sentimen terkait pelantikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta didominasi sentimen positif. Meski demikian, opini mengenai Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dilepaskan dari isu Dinasti Politik Presiden Joko Widodo yang tengah menjabat saat ini.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian opini publik. Penelitian opini publik akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Budaya digital masyarakat juga ikut andil dalam perubahan masyarakat dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah cara masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial.

Dalam penelitian ini, mengetahui opini publik bermanfaat untuk mengetahui sentimen dari masyarakat dalam ranah digital. Konteks penelitian ini adalah sentimen publik jelang dan pasca pelantikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta. Analisis sentimen ini berguna sebagai bahan evaluasi terhadap komunikasi politik yang dilakukan oleh Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka.

Tim Komunikasi Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka perlu untuk memanfaatkan *media monitoring tools* dan melakukan pengecekan secara manual terhadap pengklasifikasian sentimen publik. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia yang *high context* terbawa hingga dunia digital dan menjadi budaya digital masyarakat Indonesia. Sindiran dan sarkasme adalah salah satu contoh sentimen yang justru diklasifikasikan sebagai sentimen netral.

Adapun Tim Komunikasi Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka juga perlu untuk menjaga komunikasi publik yang dilakukan. Hal ini dikarenakan *political branding* Bobby dan Gibran akan selalu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo yang tengah menjabat saat ini.

atu elemen dari Robert N. Entman yaitu bagaimana menekankan/penyelesaian isu yang dilakukan pada program Mata Najwa episode “Mereka-Reka Cipta Kerja” di Trans7.

1. Berdasarkan seleksi isu

Seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu merupakan tahap untuk menemukan bingkai (*frame*) yang di bentuk oleh Mata Najwa dalam menyampaikan informasi terkait permasalahan pro kontra kebijakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) dalam penyelesaian permasalahan mengenai pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja. Mata Najwa menilai adanya kesalahan dari pemerintah khususnya DPR karena draft UU Cipta Kerja ini masih belum di bagikan bahkan kepada anggota Baleg sendiri. Pernyataan tersebut bisa kita lihat dari pernyataan anggota Baleg Ledia Hanifah, yang kemudian di sampaikan dan ditegaskan kembali oleh Najwa Shihab selaku moderator.

**Judul Segmen 1** : Mereka-Reka Cipta Kerja: Di Balik Kejar Tayang UU Cipta Kerja (Part 1) | Mata Najwa

**Jumlah Penonton** : 5,425,480 Penonton (8 Oktober 2020-30 Mei 2021)

No	Pengisi	Isi	Waktu
8.	Najwa Shihab	Terimakasih sudah bergabung di Mata Najwa ee ada banyak hal yang ingin saya bahas malam ini dan memang ee dan sengaja mengundang tiga lawan tiga karena saya tahu yang tiga tentunya Pro atau yang terlibat langsung dalam undang dan yang tiga yang kerap kali menyuarakan penolakan nya ee saya ingin membahas sebelum masuk substansi Saya ingin membahas soal proses prosedur awal mula bagaimana kemudian undang-undang ini disorot publik saya ingin mulai ke bu Ledia, bu Ledia yang jelas dinilai tidak terbuka, cepat, kilat, dadakan, anda kan mengalami dan mengamati langsung, terlibat langsung apakah penilaian itu tepat.	02.58-03.39
9.	Ledia Hanifah	Ya memang beberapa hal memang betul sangat cepat, karena juga kalau menurut kami ya ada beberapa hal yang e masih kurang untuk di pahami ee yaitu mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum, pakar dan lain Sebagian, sudah di lakukukan tapi masih kurang banyak karena ee itu yang ee sangat penting ya krusial, karenanya di masa resis lalu kami tidak ikut pembahasan Omnibuslaw ini karena kami ingin mengambil banyak e masukan dari masyarakat dalam hal ini konstituen kami, karena apa karna	03.39-04.52



		resis tujuannya tugasnya adalah untuk mengambil aspirasi dari masyarakat secara umum. Jadi ini persoalan yang sangat penting karena memang kemudian mengatur, mengelola 79 undang-undang ini gak gampang Mba Nana karena ada banyak hal yang harus terkait satu sama lain sinergi dan lain sebagainya, menjadi kesulitan yang besar bagi kita semua karena misalnya ee kita di dalam rapat pembahasan tingkat satu pengambilan keputusan juga belum ada draft isinya pada saat sebelum e membuat pandangan ini di fraksi, <b>jadi saya khawatir sebenarnya hoaks itu ada banyak sekali dikarenakan memang tidak pada megang draftnya itu.</b>	
10.	Najwa Shihab	<b>Anda sampai sekarang belum pegang draftnya juga bu?</b>	04.52-04.56
11.	Ledia Hanifah	Saya sampai tadi siang sudah minta tapi belum dapat	04.52-05.00
12.	Najwa Shihab	<b>Bahkan anggota DPR, anggota Baleg belum dapat draftnya?</b>	05.00-05.03
13.	Ledia Hanifah	Ee karena, katanya, masih masih diatur ee di rapihkan hal-hal yang teknisnya, ee apa menyerap hal yang teknisnya	05.03-05.14
14.	Najwa Shihab	Baik karena kami juga meminta dan belum dapat, tadinya saya waa karena media belum dapat tapi bahkan <b>anggota Balegnya sendiri juga belum dapat maka ee itu perlu di jawab nanti</b> , tapi sebelum sebelum di jawab oleh ketua Baleg saya ingin ke bang Hariz Azhar. Ee bang Hariz anda anda menyebut Undang-Undang Cipta Kerja kecurangan Legislatif, kenapa anda sampai memakai kata itu Kecurangan Legislatif ?	05.14-05.36

Selain itu, diakhir *talkshow* tersebut penyelesaian yang dilakukan oleh Mata Najwa adalah menarik komitmen dari ketua Baleg Supratman Andi Atgas tentang kepeduliannya terhadap suara-suara publik. Banyak sekali suara rakyat yang tersebar di media maupun di jalanan, diharapkan dengan penyelesain isu yang dilakukan oleh Mata Najwa dapat menjadi komitmen untuk ketua Baleg mempertimbangkan Kembali dan mendengar suara rakyat dengan memperbanyak konsultasi publik sebelum mengesahkan kebijakan untuk di patuhi oleh publik, karena Undang-Undang pada hakikatnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

**Judul Segmen 7:** Mereka-Reka Cipta Kerja: UU Cipta Kerja Disahkan, Kita Bisa Apa? (part 7) | Mata Najwa

**Jumlah Tayangan:** 1,024,595 penonton (8 Oktober 2020-30 Mei 2021)

No	Pengisi	Isi	Waktu
8.	Najwa Shihab	<b>Bang Supratman pertanyaan saya terakhir apakah DPR masih peduli dengan berbagai penilaian dan persepsi buruk rakyat terhadap wakilnya ada yang sudah semakin kencang suara-suara mosi tidak percaya anda dituduh bersalah</b>	03.25-03.37
9.	Supratman Andi Atgas	Saya yakin dan percaya bahwa sejarah akan membuktikan bahwa apa yang kita lahirkan hari ini lewat Omnibuslaw itu akan membuat titik tonggak baru bagi dalam perjalanan kehidupan	03.37-03.47
10.	Najwa Shihab	<b>Bapak Supratman yang terhormat apakah anda masih peduli dengan suara-suara publik, apakah masih peduli dengan suara publik?</b>	03.47-03.55
11.	Supratman Andi Atgas	Pasti pasti kita akan lakuin	03.55-03.59
12.	Najwa Shihab	<b>Kita akan lihat,</b> Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini Bapak Bapak Terima kasih kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Ttgas, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar Ekonomi Faisal Basri dan anggota baleg DPR fraksi PKS Ledia Hanifa Amalia sengaja kami undang 3 masing-masing pro kontra tentunya masih jauh dari selesai perbincangan ini mudah-mudahan kita akan bisa berdiskusi di lain kesempatan tetapi Mata Najwa Selamat malam terima kasih teman-teman Sehat terus semuanya sampai jumpa	03.59-04.30

### 1. Prinsip Penerapakan Jurnalisme Independen

Program Mata Najwa pada episode "Mereka-Reka Cipta Kerja" di Trans7 menunjukkan bahwa adanya keseimbangan dalam pemilihan narasumber antara yang pro dan kontra terhadap kebijakan Omnibuslaw, dari keleluasaan berbicara Mata Najwa juga tidak membatasi narasumber untuk berbicara dan *talkshow* tersebut dapat di akses secara terbuka di televisi maupun youtube kemudian untuk hasil dari diskusi tersebut juga di bagikan ke dalam kanal youtube NarasiTV dan Najwa Shihab. Tayangan program Mata Najwa Episode

“Mereka-Reka Cipta Kerja” Di Trans7 dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan menerapkan prinsip jurnalisme independent atau tidak memihak dan sangat terbuka.

Berdasarkan *analisis framing* model Robert N. Entman pada program tayangan Mata Najwa episode “Mereka-Rera Cipta Kerja” di Trans7, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembingkaiannya dalam episode ini menggambarkan mengenai sikap DPR yang kurang terbuka dalam publikasi sehingga membuat perspektif masyarakat berkembang negatif, Omnibuslaw yang memantik Polemik Berapi menyebabkan hirup perdebatan dan aksi jalanan dilakukan masyarakat. Isu yang ditonjolkan adalah prosedural lebih sering di bahas pada episode ini dibandingkan membahas isi/substanti, kemudian penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan menarik komitmen ketua Baleg untuk mendengar dan mempertimbangkan suara publik.

Program Mata Najwa pada episode “Mereka-Reka Cipta Kerja” di Trans7 menunjukkan bahwa adanya keseimbangan dalam pemilihan narasumber antara yang pro dan kontra terhadap kebijakan Omnibuslaw, dari keleluasaan berbicara Mata Najwa juga tidak membatasi narasumber untuk berbicara dan *talkshow* tersebut dapat diakses secara terbuka di televisi maupun youtube kemudian untuk hasil dari diskusi tersebut juga dibagikan ke dalam kanal youtube NarasiTV dan Najwa Shihab. Tayangan program Mata Najwa Episode “Mereka-Reka Cipta Kerja” Di Trans7 dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan menerapkan prinsip jurnalisme independent atau tidak memihak dan sangat terbuka.

Pada zaman digital seperti saat ini, internet merupakan bagian yang tidak asing lagi dimasyarakat. Setiap kalangan mulai dari anak-anak sampai orangtua sudah mengenal media sosial dan Youtube untuk saling berinteraksi dan menerima informasi. Karena, semakin bebasnya setiap orang bisa berinteraksi dan berbagi informasi, maka masyarakat sebagai penerima informasi perlu memahami bahwa setiap informasi yang disampaikan merupakan sesuatu yang dikonstruksi. Untuk itu masyarakat harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi dalam menerima setiap informasi.

### **Daftar Pustaka**

- Eriyanto. 2002. Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.
- Atmadja, Xena Levina. 2014. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online. Jurnal E-Komunikasi 2, [Vol 2, No 1](#)
- Prabowo, A. S.; Triputra, A. N.; & Junaidi, Y. 2020. “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia”. *Pamator Journal* 13, no. 1: 1–6
- Waluyo, Djoko (2018). ["Makna Jurnalisme Dalam Era Digital: Suatu Peluang Transformasi"](#). *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1 (1): 35. [ISSN 2623-1212](#)

- Saragih, M. Y. (2018). "[Media Massa dan Jurnalisme: Kajian Pemaknaan Antara Media Massa Cetak dan Jurnalistik](#)". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. **6** (1): 87. [ISSN 2355-8679](#)
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Penyiaran and Indonesia. 2019. *Kualitas Program Siaran Tv Periode Ii Tahun 2019*. KPI.

**Sumber lain:**

- RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkum Ham. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus-law-ciptalapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi>.
- Sekretariat Presiden, *Pernyataan Presiden RI Penundaan Pembahasan Kluster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, 24 April 2020* (Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=AcuEbz9AJL0>.
- F Agus-Setyawan, "DPR Jadwalkan 10 Kali Rapat RUU Ciptaker Hingga Paripurna," *Ww.Cnnindonesia.Com*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200616172238-32-513963/dpr-jadwalkan-10-kali-rapat-ruu-ciptaker-hingga-paripurna>.
- Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Viral Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Saat Politikus Demokrat Interupsi," *Tempo.Co*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1393388/viral-puan-maharani-diduga-matikan-mikrofon-saat-politikus-demokrat-interupsi/full&view=ok>.
- Vina Fadhrotul, "Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Dari Interupsi Hingga Walk-Out," *Kompas.Com*, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari?page=all>.
- fey/nma/NMA, "Pelajar Ikut Demo Tolak UU Ciptaker Bersama Buruh & Mahasiswa," *Cnnindonesia.Com*, November 16, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201116144136-20-570371/pelajar-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker-bersama-buruh-mahasiswa>.
- M Badri, "Jurnalisme Independen Vs Jurnalisme Partisan," <http://ajikotamandar.or.id/>, 2020, <http://ajikotamandar.or.id/2017/01/06/jurnalisme-independen-vs-jurnalisme-partisan/>.
- Barratut Taqiyah Rafie, "Program 'Mata Najwa' Nongol Lagi, Tapi Kini Pindah Ke Trans7," *Tribunnews.Com*, 2018,

<https://www.tribunnews.com/seleb/2018/01/05/program-mata-najwa-nongol-lagi-tapi-kini-pindah-ke-trans7>.

Rony Wijaya, “Biografi Najwa Shihab.”

### Referensi

Abidin, S., & Cindoswari, A. R. (2019). POLITICAL BRANDING RIDWAN KAMIL PADA MASA KAMPANYE PILGUB JAWA BARAT 2018 MELALUI TWITTER. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i1.1439>

Bengry-Howell, A., Wiles, R., Nind, M., & Crow, G. (2011). A review of the academic impact of three methodological innovations: Netnography, child-led research and creative research methods. *Social Sciences*.

Chen, L. C. P. (2008). Advances in Internet Research Methods -- Netnography. *Journal of Library and Information Science Research*.

Firdausi, I. A., & Sururi, A. (2019). Kegagalan Komunikasi Politik Dinasti dalam Pemilukada Kota Serang 2018. *Warta ISKI*. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i01.28>

Hine, C. (2015). Ethnographies of Online Communities and Social Media: Virtual Ethnography and Netnography. *Annual Review of Sociology*.

Husna, A. (2017). Analisis Political Branding Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Aceh 2017. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(1), 56–73.

Kozinets, R. V. (2015). Netnography. In *The International Encyclopedia of Digital Communication and Society*. <https://doi.org/10.1002/9781118767771.wbiedcs067>

Krisnanto, I. W., & Fitriyah. (2017). *Strategi Pemasaran Politik pada Era Digital: Pemanfaatan Instagram dalam Kampanye Politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017*.

Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy? *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38090>

Oxford University Press. (2019). Oxford Dictionaries.

- Pamungkas, C. P. (2018). Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
- Riyanti, J. (2020). Marketing Politik di Media dan Softening News Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Wali Kota Solo. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 89–98. <https://doi.org/10.12928/channel.v8i2.15878>
- Santoso, H. (2018). Saluran Media Politik Dinasti Yasin dalam Pilkada Kabupaten Bogor. *MetaKom*, 2(1), 37–52. <https://doi.org/10.23960/metakom.v2i1.19>
- Susanto, E. H. (2017). MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK. *Jurnal ASPIKOM*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>

# **DIALEKTIKA KOMUNIKA**

P - ISSN : 2338-4751

E - ISSN : 2716-4012